



Sektor Pertambangan: Dampak Positif dan Dampak Negatif terhadap Perekonomian Bangsa

Musdar Muhammad^{1*}, Bahrin Talib², Roif Hidayatulloh³

¹⁻³ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Khairun, Indonesia

*Penulis Korespondensi: musdar@unkhair.ac.id

Abstract. Indonesia possesses abundant natural resources, particularly in the mining sector, which play a crucial role in supporting the national economy. Commodities such as coal, nickel, gold, copper, as well as oil and natural gas contribute significantly to government revenue, exports, employment creation, and infrastructure development in mining-producing regions. Over the past decade, rising global demand for new and renewable energy has positioned nickel as a strategic commodity, thereby encouraging increased investment and the strengthening of downstreaming policies through the development of mineral processing facilities. However, mining activities also generate negative impacts, including environmental degradation, declining public health conditions, and social inequality in communities surrounding mining areas. Therefore, although the mining sector has the potential to drive economic growth and increase local incomes, its management must be guided by the principles of sustainable development to ensure that economic benefits do not come at the expense of environmental preservation and social welfare.

Keywords: Downstreaming; Economic Growth; Environmental Impact; Mining Sector; Sustainable Development.

Abstrak. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, khususnya di sektor pertambangan, yang berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional. Komoditas seperti batu bara, nikel, emas, tembaga, serta minyak dan gas bumi memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara, ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur di daerah penghasil tambang. Dalam satu dekade terakhir, meningkatnya kebutuhan global terhadap energi baru dan terbarukan menjadikan nikel sebagai komoditas strategis, sehingga mendorong investasi dan penguatan kebijakan hilirisasi melalui pembangunan fasilitas pengolahan mineral. Namun, aktivitas pertambangan juga menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, serta ketimpangan sosial di wilayah sekitar tambang. Oleh karena itu, meskipun sektor pertambangan berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat, pengelolaannya perlu diarahkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan agar manfaat ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: Dampak Lingkungan; Hilirisasi; Pembangunan Berkelanjutan; Pertumbuhan Ekonomi; Sektor Pertambangan.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara dengan ketersediaan sumber daya alam yang sangat besar, terutama di sektor pertambangan. Berbagai komoditas utama seperti batu bara, nikel, emas, tembaga, minyak, dan gas bumi telah lama menjadi penopang penting perekonomian nasional. Peran strategis sektor ini tercermin melalui kontribusinya terhadap penerimaan negara, peningkatan nilai ekspor, penyediaan lapangan kerja, serta percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah-wilayah penghasil tambang.

Perkembangan industri global dalam satu dekade terakhir menunjukkan pergeseran signifikan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Kondisi ini mendorong meningkatnya permintaan terhadap nikel, yang kini menjadi bahan baku utama dalam produksi baterai kendaraan listrik dan berbagai teknologi industri modern. Menanggapi peluang

tersebut, pemerintah Indonesia memperkuat arah kebijakan investasi pertambangan melalui program hilirisasi, antara lain dengan pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan mineral. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat daya saing industri nasional, serta membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dalam jangka panjang.

Namun, di balik kontribusi ekonominya, aktivitas pertambangan juga memunculkan berbagai persoalan serius, terutama pada aspek lingkungan, sosial, dan kesehatan masyarakat. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya tambang kerap menekan keberlanjutan sektor lain seperti pertanian dan perikanan, sekaligus menurunkan kualitas lingkungan hidup. Temuan Greenpeace Indonesia dan Celios, (2024) mengungkap bahwa desa-desa yang sangat bergantung pada pertambangan sebagai sumber mata pencaharian utama cenderung memiliki akses pendidikan yang lebih terbatas dibandingkan desa non-tambang, tercermin dari minimnya jumlah sekolah formal dari tingkat dasar hingga menengah. Selain itu, masyarakat di wilayah pertambangan juga menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih dan layanan kesehatan yang layak.

Di sisi lain, investasi di sektor pertambangan terbukti memberikan dampak ekonomi yang positif. Penelitian Lestari, (2016) menunjukkan bahwa selama 15 tahun terakhir, investasi di sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Temuan ini menegaskan peran strategis sektor pertambangan dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Meski demikian, kajian lain mengenai praktik hilirisasi nikel menunjukkan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan belum sepenuhnya berkelanjutan. Peningkatan nilai ekspor dan pertumbuhan ekonomi yang dicapai mulai diimbangi oleh dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, yang dalam jangka panjang berpotensi mengurangi keuntungan ekonomi itu sendiri.

Tingginya ketergantungan terhadap sektor pertambangan juga memperlihatkan kerentanan terhadap perubahan kondisi eksternal. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menjadi contoh nyata, ketika sektor pertambangan yang sebelumnya menjadi tulang punggung perekonomian di beberapa daerah, seperti Kalimantan Selatan, mengalami kontraksi yang cukup signifikan. Situasi ini menunjukkan bahwa ketergantungan berlebihan pada sektor berbasis komoditas dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas ekonomi regional.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat celah penelitian terkait bagaimana dampak ekonomi sektor pertambangan khususnya melalui investasi dan kebijakan hilirisasi berinteraksi dengan dimensi sosial, lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi di tingkat regional. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dampak sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan

pembangunan, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi kebijakan yang lebih seimbang dan berorientasi jangka panjang.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kutukan Sumber Daya (*Resource Curse*).

Teori resource curse atau “kutukan sumber daya” menyatakan bahwa wilayah yang kaya akan sumber daya alam justru berpotensi mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan wilayah yang tidak terlalu bergantung pada sumber daya tersebut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti korupsi, ketergantungan terhadap satu jenis komoditas, volatilitas harga global, serta lemahnya kualitas institusi dan tata kelola.

Penelitian oleh Fleming et al., (2015) menggarisbawahi bahwa dampak dari eksploitasi sumber daya alam bisa berbeda tergantung pada skalanya. Apa yang tampak sebagai “berkah” di tingkat nasional, bisa menjadi “kutukan” di tingkat daerah. Sementara itu, Kim & Lin, (2018) dalam *The Resource Curse Hypothesis: Dynamic Heterogeneous Approach* menyatakan bahwa pengaruh sumber daya terhadap ekonomi sangat tergantung pada karakteristik internal suatu negara terutama kualitas institusinya dan kemampuan melakukan diversifikasi ekonomi.

Kajian literatur terbaru juga mempertegas bahwa negara dengan institusi yang lemah lebih rentan terhadap efek negatif dari ketergantungan sumber daya. Sebaliknya, negara dengan institusi yang kuat dan akuntabel cenderung mampu mengubah kekayaan alam menjadi manfaat ekonomi jangka panjang Narh, (2025).

Teori ini memberikan dasar pemahaman bahwa keberadaan sektor pertambangan tidak otomatis memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Efektivitas kontribusi sektor ini sangat tergantung pada kualitas tata kelola, keragaman ekonomi, serta ketahanan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Teori Keterkaitan Ekonomi dan Efek Multiplier.

Dalam ekonomi pembangunan, teori linkage menjelaskan bagaimana sektor utama seperti pertambangan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya melalui efek backward dan forward. Backward linkage mengacu pada kebutuhan sektor tambang terhadap input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan layanan pendukung dari sektor lain. Forward linkage mencakup proses pengolahan lebih lanjut dari hasil tambang seperti smelter atau industri manufaktur berbasis mineral.

Penelitian oleh Fatma & Sri Rahayu, (2025) menunjukkan bahwa sektor pertambangan logam di Sulawesi Tenggara mengalami pertumbuhan signifikan. Namun, efek multiplier-nya masih terbatas, khususnya jika dibandingkan dengan sektor industri dan jasa.

Teori linkage dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pertambangan mendorong pertumbuhan ekonomi sektoral dan regional. Analisis ini membantu mengidentifikasi apakah dampak pertambangan bersifat menyeluruh atau justru terbatas pada lingkaran industri inti.

Teori Dampak Sosial-Ekonomi dan Lingkungan.

Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks pertambangan, aktivitas eksploitasi sumber daya alam dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, baik secara sosial maupun ekologis.

Penelitian oleh Ramadanti et al., (2024) dalam studi di wilayah timur Indonesia menemukan bahwa ada hubungan timbal balik antara kualitas lingkungan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi-provinsi penghasil tambang. Ini berarti, kerusakan lingkungan dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, dan sebaliknya, pembangunan manusia yang rendah juga memperburuk penanganan dampak lingkungan.

Penelitian oleh Wibowo et al., (2022) yang mempelajari praktik tambang emas ilegal di Jambi menunjukkan dampak nyata berupa pencemaran air dan perubahan lanskap. Dampak ini berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam sekitar.

Dari sisi sosial, studi oleh Safitri et al., (2024) di Lasolo, Konawe, menunjukkan bahwa meskipun tambang menyerap tenaga kerja lokal, kontribusinya terhadap penguatan ekonomi keluarga masih sangat kecil, hanya sekitar 0,10% dari total angkatan kerja. Sementara itu, studi di Kalimantan Selatan Jumriani et al., (2023) mencatat bahwa masyarakat di sekitar tambang tradisional mengembangkan berbagai strategi adaptif untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi dan kerusakan lingkungan.

Teori ini membuka ruang untuk menilai sejauh mana aktivitas pertambangan memengaruhi kesejahteraan masyarakat lokal. Ini juga menjadi dasar untuk menganalisis efektivitas kebijakan mitigasi seperti CSR (Corporate Social Responsibility) serta perlunya penguatan perlindungan lingkungan dan hak sosial masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggabungkan tiga metode utama: studi dokumen, analisis dokumen, dan literature review. Ketiga metode ini saling melengkapi dalam proses pengumpulan dan analisis data, khususnya untuk mengkaji dampak sektor pertambangan terhadap perekonomian dari berbagai aspek.

Studi Dokumen (*Documentary Study*)

Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Dokumen yang dianalisis meliputi laporan resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah, data statistik dari BPS dan Kementerian ESDM, serta laporan dari organisasi masyarakat sipil. Tujuan utama metode ini adalah memperoleh gambaran faktual dan historis mengenai kontribusi dan dampak sektor pertambangan di Indonesia.

Analisis Dokumen (*Document Analysis*)

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis isi dokumen-dokumen tersebut. Analisis dilakukan dengan menyeleksi informasi yang relevan, mengelompokkan data berdasarkan tema-tema utama (seperti dampak positif dan negatif), serta mengidentifikasi keterkaitan antarvariabel. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali pola, perbedaan pandangan, hingga potensi ketimpangan dalam konteks ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.

Tinjauan Pustaka (*Literature Review*)

Literature review dilakukan untuk mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik. Sumber yang digunakan mencakup jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, serta publikasi penelitian dalam 10 tahun terakhir.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Positif Sektor Pertambangan terhadap Perekonomian.

Pertumbuhan sektor pertambangan logam, terutama nikel, di Sulawesi Tenggara menunjukkan kontribusi ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data 2019 hingga 2023, sektor ini tercatat menyumbang peningkatan sebesar 40,63% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Temuan ini diperkuat oleh penelitian Fatma & Sri Rahayu, (2025) yang menyatakan bahwa meskipun efek multiplier sektor pertambangan belum sekuat sektor industri dan jasa, kontribusinya terhadap output dan penyerapan tenaga kerja tetap berdampak nyata pada pertumbuhan ekonomi regional.

Dari sudut pandang teori Resource Curse, kondisi ini menjadi bukti bahwa kekayaan sumber daya alam tidak selalu membawa dampak negatif atau stagnasi ekonomi, seperti yang sering diasumsikan. Justru sebaliknya, daerah dengan pengelolaan sumber daya yang baik meliputi regulasi lokal yang efektif dan keberadaan investasi pada sektor hilir berpotensi besar menjadikan sektor tambang sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi nikel dan pengembangan industri pengolahan di Sulawesi Tenggara mencerminkan keberhasilan dalam memanfaatkan potensi forward linkage, di mana hasil tambang tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah, tetapi diolah untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi Fatma & Sri Rahayu, (2025).

Peningkatan Pendapatan dan Kesempatan Kerja.

Kegiatan pertambangan, khususnya nikel di Mandiodo, Konawe, memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Studi oleh Karsadi & Aso, (2023) menemukan bahwa selain membuka lapangan kerja di sektor tambang, warga lokal juga memanfaatkan peluang ekonomi lainnya dengan membuka usaha seperti rumah kos, warung makan, dan jasa sewa properti. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas tambang turut menggerakkan ekonomi lokal secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks serupa, menurut Anisa, (2023) penelitian di Desa Kameloh Baru mencatat bahwa pertambangan emas ilegal juga meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan dibandingkan sebelum adanya kegiatan tambang (e-Journal). Meski aktivitas ini tidak resmi, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi jangka pendek cukup nyata.

Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Infrastruktur.

Dari hasil penelitian Karsadi & Aso, (2023) kegiatan pertambangan nikel di Mandiodo Village memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui terciptanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan pendapatan masyarakat, terutama melalui diversifikasi usaha ekonomi mikro seperti usaha kos-kosan dan warung makan, serta membuka peluang kerja di perusahaan pertambangan.

Selain itu, keberadaan perusahaan tambang juga mendukung pembangunan infrastruktur secara tidak langsung, meskipun terdapat kerusakan jalan dan jembatan akibat aktivitas kendaraan tambang yang menyebabkan kerusakan fisik dan gangguan mobilitas masyarakat.

Diversifikasi Ekonomi Lokal.

Untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan yang sering menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, diversifikasi ekonomi menjadi strategi penting bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang. Salah satu pendekatan yang dapat

diterapkan adalah diversifikasi mata pencaharian melalui pola nafkah ganda di kalangan anggota keluarga usia produktif. Strategi ini memungkinkan masyarakat memanfaatkan peluang kerja di berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan baik secara mandiri maupun melalui program pemberdayaan yang difasilitasi oleh pemerintah dan perusahaan Asdan et al., (2023).

Pendekatan ini tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi, meminimalkan risiko jika satu sektor mengalami penurunan, serta menjaga keberlangsungan sosial dan budaya lokal. Dengan demikian, diversifikasi ekonomi menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang lebih tangguh terhadap dinamika sosial ekonomi akibat aktivitas industri pertambangan.

Dampak Negatif terhadap Perekonomian dan Ekologi.

Meskipun sektor pertambangan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, berbagai studi menegaskan bahwa dampak negatifnya dapat menghambat pertumbuhan jangka panjang atau menciptakan ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Penelitian oleh Wibowo et al., (2022) tentang tambang emas ilegal di Jambi menunjukkan bahwa aktivitas tersebut merusak kualitas sumber daya alam, khususnya air bersih, serta mengubah struktur lanskap. Kondisi ini berdampak pada penurunan kesehatan masyarakat dan menurunnya produktivitas pertanian lokal. Meskipun tidak langsung tercermin dalam angka PDRB, beban sosial dan lingkungan yang ditimbulkan berpotensi melemahkan fondasi pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Studi lain yang dilakukan melalui pendekatan Life Cycle Assessment pada tambang batubara di Kalimantan Timur Diharjo & Manik, (2024) menemukan bahwa tahapan pengupasan lapisan tanah atas (overburden stripping) dan transportasi batubara menghasilkan emisi karbon yang tinggi, partikel debu halus, serta konsumsi air dalam jumlah besar. Tanpa adanya kebijakan mitigasi lingkungan yang efektif, dampak ini dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan meningkatkan beban biaya kesehatan. Jika tidak ditangani dengan serius, akumulasi dampak ini akan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah penghasil tambang.

Eksternalitas Lingkungan dan Beban Biaya Kesehatan.

Studi *The Negative Externality of Mining Activities in Brown Canyon* oleh Furoida & Susilowati, (2021) mendokumentasikan bahwa masyarakat sekitar mengalami penurunan kualitas air bersih, polusi udara, dan kebisingan akibat aktivitas pertambangan. Metode cost of illness dan replacement cost digunakan untuk memperkirakan kerugian, yang rata-rata mencapai Rp 192.030 per keluarga per bulan untuk biaya kesehatan dan lingkungan. Data ini

menggambarkan bahwa kerugian sosial dan lingkungan memang ada dan cukup nyata, meskipun tidak selalu tercermin dalam indikator ekonomi makro seperti PDRB.

Ancaman Sosial dan Ketimpangan dalam Keadilan Lingkungan.

Penelitian *Environmental and Social Injustice: Impact and Sustainability of Small Scale Tin Mining under Indonesia's New Mineral and Coal Regulation* Rahayu et al., (2023) menunjukkan bahwa perubahan regulasi pertambangan (Undang-Undang Minerba No. 3/2020) belum berhasil mengatasi masalah pertambangan ilegal di Bangka Belitung. Masyarakat lokal masih merasakan kerusakan lingkungan dan ketidakadilan dalam izin pertambangan, termasuk kurangnya perlindungan terhadap hak-hak mereka dan distribusi manfaat ekonomi yang timpang.

Selain itu, studi *Legal Accountability of Small-Scale Miners for Environmental Damage* Mangunsong & Riswaldi, (2025) mengulas bahwa aktivitas penambangan skala kecil tanpa izin sering melanggar prinsip perlindungan lingkungan, mencemari tanah dan air, serta merusak ekosistem. Ketidakjelasan peraturan dan lemahnya pengawasan memperparah ketimpangan keadilan ini.

Keterbatasan Dampak Ekonomi terhadap Tenaga Kerja Lokal.

Penelitian *The Impact of Mining on Labor Absorption and the Economy of Working Families in Lasolo District, North Konawe Regency* oleh Safitri, Safitri et al., (2024) menemukan bahwa perusahaan tambang di Lasolo hanya menyerap 50 pekerja, dimana 35 adalah lokal. Namun kontribusi terhadap keseluruhan tenaga kerja di wilayah tersebut hanya sekitar 0,10%, menandakan bahwa meski ada penyerapan tenaga kerja, dampaknya terhadap ekonomi keluarga dan kesejahteraan lokal masih terbatas.

Dampak Lingkungan Jangka Panjang dan Tantangan Rehabilitasi.

Studi *Life Cycle Assessment a Coal Mining in East Kalimantan* Diharjo & Manik, (2024) mengidentifikasi bahwa tahap-tahap seperti overburden stripping, pembukaan lahan, dan proses transportasi batubara menyumbang dampak lingkungan signifikan: emisi gas rumah kaca, partikel halus (PM2.5), serta konsumsi air yang sangat tinggi. Tanpa adanya tindakan rehabilitasi dan pengelolaan pasca-tambang yang memadai, dampak ini dapat menurunkan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terdampak.

Selain itu, Setelah tambang selesai operasi lahan yang rusak harus direklamasi agar dapat kembali produktif dan tidak merugikan masyarakat setempat.

Analisis Keseluruhan dan Implikasi.

Dalam satu dekade terakhir, sektor pertambangan telah menjadi salah satu penggerak utama ekonomi Maluku Utara. Provinsi ini memiliki cadangan nikel yang melimpah dan

menjadi lokasi strategis bagi proyek hilirisasi nasional, seperti Kawasan Industri Weda Bay (IWIP). Dampaknya cukup nyata: pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat, lapangan kerja tercipta, dan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan dan jalan mengalami percepatan.

Secara ekonomi, kehadiran sektor ini memperkuat konektivitas industri lokal dan mendorong pengembangan hilirisasi. Proses pengolahan mineral di dalam negeri memperbesar nilai tambah serta menciptakan peluang kerja baru. Kondisi ini mencerminkan praktik forward linkage, di mana pertambangan tidak lagi sekadar mengeksport bahan mentah, tetapi menjadi fondasi bagi industri pengolahan yang berkelanjutan.

Namun, pencapaian ekonomi tersebut tidak lepas dari tantangan serius. Di beberapa wilayah seperti Pulau Gebe dan Pulau Obi, ekspansi tambang telah memicu kerusakan lingkungan mulai dari pencemaran air dan laut, degradasi lahan, hingga terganggunya ekosistem mangrove. Masalah sosial juga mencuat, termasuk konflik agraria, kesenjangan antara tenaga kerja lokal dan pendatang, serta keterpinggiran masyarakat adat dari proses pengambilan keputusan.

Fenomena ini memperkuat argumen dari teori Resource Curse, yang menyatakan bahwa kekayaan sumber daya alam bisa menjadi hambatan pembangunan bila tidak didukung oleh tata kelola yang baik. Jika aspek sosial dan ekologis diabaikan, maka manfaat ekonomi jangka pendek bisa berubah menjadi beban jangka panjang baik bagi daerah maupun masyarakatnya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sektor pertambangan memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang besar terhadap penerimaan negara, pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, serta pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah kaya sumber daya alam seperti Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Kebijakan hilirisasi, khususnya pada komoditas bernilai strategis seperti nikel, memperlihatkan bahwa pengelolaan sumber daya yang tepat dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi melalui forward linkage. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak selalu identik dengan stagnasi ekonomi sebagaimana diasumsikan dalam teori resource curse, melainkan dapat menjadi penggerak pertumbuhan jika didukung oleh tata kelola yang efektif.

Di sisi lain, manfaat ekonomi tersebut diiringi oleh berbagai konsekuensi yang tidak dapat diabaikan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa aktivitas pertambangan sering memicu dampak negatif terhadap lingkungan, sosial, dan kesehatan masyarakat, mulai dari

degradasi lahan, pencemaran air dan udara, hingga meningkatnya beban biaya kesehatan dan ketimpangan akses terhadap pendidikan serta layanan dasar. Selain itu, keterbatasan penyerapan tenaga kerja lokal dan tingginya ketergantungan ekonomi pada sektor pertambangan membuat daerah penghasil rentan terhadap tekanan eksternal, seperti fluktuasi harga komoditas, krisis global, maupun pandemi.

Dengan demikian, keberlanjutan sektor pertambangan sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola yang diterapkan. Penguatan regulasi, pengawasan lingkungan yang konsisten, distribusi manfaat yang lebih adil, serta pelaksanaan reklamasi pascatambang menjadi prasyarat utama. Pada saat yang sama, upaya diversifikasi ekonomi lokal perlu terus diperkuat agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada aktivitas pertambangan. Pendekatan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis akan memungkinkan sektor pertambangan berfungsi sebagai motor pembangunan jangka panjang, bukan sekadar sumber pertumbuhan ekonomi sesaat.

DAFTAR REFERENSI

- Anisa, N. (2023). Kameloh Baru Village: A Case Study on the Impacts of Unlicensed Gold Mining on the Local Economy and the Environment Use. *Journal Magister Ilmu Ekonomi Universitas Palangka Raya: GROWTH*, 9(1), 28–38.
- Asdan, A., Syafri, S., & Jaya, B. (2023). Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal Pada Sekitar Kawasan Pertambangan PT Indonesia Weda Bay Park. *Urban and Regional Studies Journal*, 6(1), 58–70. <https://doi.org/10.35965/ursj.v6i1.3859>
- Diharjo, D. F. M. W., & Manik, Y. B. S. (2024). Life Cycle Assessment a Coal Mining in East Kalimantan. *JST (Jurnal Sains Dan Teknologi)*, 12(3), 613–621. <https://doi.org/10.23887/jstundiksha.v12i3.68103>
- Fatma, M., & Sri Rahayu, A. Y. (2025). The Contribution Of Metal Mining To Southeast Sulawesi's Economy: An Input-Output Analysis. *Journal Research of Social Science, Economics & Management*, 4(10).
- Fleming, D. A., Measham, T. G., & Paredes, D. (2015). Understanding the Resource Curse (or Blessing) across National and Regional Scales: Theory, Empirical Challenges and an Application. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 59(4), 624–639. <https://doi.org/10.1111/1467-8489.12118>
- Furoida, A., & Susilowati, I. (2021). The negative externality of mining activities in Brown Canyon. *Economics Development Analysis Journal*, 10(4), 450–462.
- Greenpeace Indonesia dan Celios. (2024). *Kesejahteraan Semu di Sektor Ekstraktif*.
- Jumriani, Rochgiyanti, R., & Kanukisya, B. (2023). Socio-Economic Dynamics: Traditional Mining and Community Resilience in South Kalimantan. *Society*, 11(2), 502–514. <https://doi.org/10.33019/society.v11i2.634>
- Karsadi, K., & Aso, L. (2023). Multidimensional Impacts of Nickel Mining Exploitation towards the Lives of the Local Community. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2),

222–227. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.58881>

- Kim, D.-H., & Lin, S.-C. (2018). The resource curse hypothesis: dynamic heterogeneous approach. *Emerging Markets Finance and Trade*, 54(12), 2698–2717.
- Lestari, D. (2016). Dampak Investasi Sektor Pertambangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 18(2), 176–186.
- Mangunsong, T. M., & Riswaldi, R. (2025). Legal Accountability of Small-Scale Miners for Environmental Damage. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(2), 329–337. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.427>
- Narh, J. (2025). The Resource Curse and the Role of Institutions Revisited. *Environment, Development and Sustainability*, 27(4), 8187–8207. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-04279-6>
- Rahayu, D. P., Faisal, F., Darwance, D., & Ferdian, J. (2023). Environmental and Social Injustice: Impact and Sustainability of Small Scale Tin Mining Under Indonesia's New Mineral and Coal Regulation. *Cepalo*, 7(2), 119–130. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v7no2.3137>
- Ramadanti, S. S., Azwardi, & Subardin, M. (2024). Economic, Environment, and Social Welfare in the Mineral Economy Provinces of Eastern Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(2), 132–142. <https://doi.org/10.22219/jep.v22i02.34599>
- Safitri, D., Turi, L. O., & Kartomo. (2024). The Impact of Mining on Labor Absorption and the Economy of Working Families in Lasolo District, North Konawe Regency. *Perkembangan Kajian Sosial*, 1(2), 63–74. <https://doi.org/10.69616/perkasa.v1i2.14>
- Wibowo, Y. G., Ramadan, B. S., Maryani, A. T., Rosarina, D., & Arkham, L. O. (2022). Impact of Illegal Gold Mining in Jambi, Indonesia. *Indonesian Mining Journal*, 25(1), 29–40. <https://doi.org/10.30556/imj.vol25.no1.2022.1271>